

## **POLEMIK PEMBIAYAAN ACARA *BATAGAK GALA* DI KANAGARIAN KAMBANG BARAT, PESISIR SELATAN**

*Delpa*<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Perintis Indonesia, Jalan KM 15, Simpang Kalumpang, Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia 25173

\*Corresponding author: starring342014@gmail.com

**Abstract** Penelitian ini membahas tentang pemilihan calon penyandang gelar adat kebesaran kaum/suku yang didominasi oleh individu yang kaya. Hal ini disebabkan karena besarnya biaya yang perlu dipersiapkan untuk acara penobatan gelar. Maka, hanya individu kelas menengah ke atas yang sanggup melaksanakan acara *Batagak Gala* di Kanagarian Kambang Barat, Pesisir Selatan. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti sejauh manakah peran individu sebagai pemegang gelaran adat yang tidak memiliki pemahaman tentang tradisi dapat memberikan kontribusi terhadap tradisi dan kaumnya di kampung halaman. Metodologi kajian dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, metodologi pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*In-depth interview*) terhadap informan kajian. Kedua, metodologi pemilihan informan menggunakan *snowball sampling*. Informan terdiri dari enam orang, di mana 1 orang informan berasal dari anggota KAN, 2 orang dari calon pemangku adat, 1 orang informan berasal dari orang yang baru saja melaksanakan acara *Batagak Gala*, 1 orang informan berasal dari pemuka agama, dan 1 orang informan berasal dari pemuka masyarakat. Di samping itu peneliti juga menggunakan partisipasi observasi dengan menerapkan kaidah etnografi. Ketiga, metodologi analisis data menggunakan kaidah kualitatif. Temuan kajian mendapati bahwa arus modernisasi dan globalisasi telah menyebabkan luntarnya pemahaman tentang nilai tradisi di kalangan generasi sebagai pewaris pemegang gelar adat. Akibatnya, pemegang gelar tidak memiliki kemampuan adat sehingga mengakibatkan individu pemegang gelar kurang dapat memberikan kontribusi terhadap tradisi dan kaumnya secara efektif. Kegiatan rutinitas adat hanya dijalankan oleh wakil dari pemegang gelar (*Panungkek*) yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kesimpulan kajian adalah modernisasi dan globalisasi telah menghilangkan nilai-nilai budaya dan tradisi terhadap generasi muda sebagai pewaris budaya. Akibatnya, pemilihan terhadap calon pemegang gelar adat perlu memiliki sukar mencari pengganti kepemimpinan yang sebelumnya.

### **Keyword:**

*Kepemimpinan,  
komunikasi, tradisi*

### **Article Info**

**Received : 12 Sept 2023**

**Accepted : 22 Okt 2023**

**Published : 20 Nov 2023**

## 1. Pendahuluan

Otonomi daerah telah memberi wajah baru dalam geliat pembangunan tradisi. Menurut Abdul (2003), salah satu objektif konsep otonomi daerah telah memberikan peluang kepada setiap etnis untuk menghidupkan kembali tradisi dan budaya di seluruh Indonesia. Dengan adanya konsep otonomi daerah ini telah mendorong masing-masing etnis memberikan tumpuan perhatian terhadap tradisi dan budaya warisan leluhurnya. Adapun bentuk dilema dari kehadiran konsep otonomi daerah di Indonesia memperlihatkan adanya makna yang ambiguitas. Bentuk ambiguitas tersebut terlihat dengan adanya persepsi oleh sebagian masyarakat menilai kehadiran otonomi daerah dapat dapat memberikan peluang seluas-luasnya untuk membangkitkan kembali (revitalization) dan menyemarakkan tradisi oleh masing-masing etnis di Indonesia. Namun yang menjadi dilema adalah terdapatnya persepsi masyarakat yang menilai bahwa konsep otonomi daerah tidak sepenuhnya masyarakat menerima adanya kebangkitan tradisi tersebut karena mereka telah terbawa arus oleh arus kemajuan yang secara tidak langsung muncul sikap penolakan terhadap upaya menghidupkan dan menyemarakkan tradisi.

Persepsi ini pada dasarnya terbentuk akibat ramainya di kalangan masyarakat terbawa arus oleh kemajuan media teknologi komunikasi dan gadget. Damsar (2005) menegaskan rendahnya kesadaran etnis memelihara dan mempertahankan tradisi tidak hanya semata disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemaparan tradisi oleh generasi tua terhadap generasi muda. Akan tetapi hal ini juga disebabkan faktor arus kemajuan yang pada akhirnya telah menyebabkan terbentuknya berbagai persepsi oleh masyarakat terkait implikasi dan sasaran konsep otonomi daerah. Beliau juga menjelaskan konsep otonomi daerah telah membuka kesempatan setiap etnis untuk dipaparkan secara masif sehingga generasi muda berpeluang mengenali dan memahami eksistensi tradisi warisan leluhurnya sendiri secara bertahap dan berkelanjutan. Persepsi positif memiliki kecenderungan untuk menerima kehadiran otonomi daerah sebagai acuan untuk menghidupkan kembali keragaman tradisi. Manakala muncul juga persepsi negatif oleh sebagian generasi muda terhadap upaya membangkitkan kembali keragaman tradisi. Menurut Istiqomah dan Widiyanto (2020) menilai kehadiran modernisasi dan globalisasi menghadirkan budaya pop sehingga kalangan generasi muda lebih terobsesi terhadap nilai budaya Barat sehingga mereka lebih tertarik terhadap budaya yang terpapar dalam perfileman, media online, komik, game dan sastera. Model budaya pop secara tidak langsung telah mengalihkan perhatian dan minat generasi muda terhadap tradisi warisan orang terdahulu seperti tradisi *Batagak Gala* yang kurang diminati generasi muda.

Misalnya di Sumbar mulai bergerak secara bersama-sama baik pemerintah, organisasi adat, pemuka adat dan segenap masyarakat sipil untuk mengembangkan dan menghidupkan kembali tradisi warisan leluhur seperti upacara pewarisan gelar adat, dinamakan acara *Batagak Gala*. Pada dasarnya acara *Batagak Gala* di Sumatera Barat masih tetap terpelihara dan diamalkan secara turun-temurun. Namun dengan adanya konsep otonomi daerah telah memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan tradisi terutama dalam acara *Batagak Gala* yang juga merupakan salah satu tarikan pelancong di Sumatera Barat. Menurut Navis (1984), acara *Batagak Gala* pada hakikatnya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya pelestarian budaya. Bahkan acara *Batagak Gala* ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat setempat. Wisatawan lokal maupun nasional turun datang menghadiri acara berkenaan. Bahkan acara tersebut menjadi acara kebanggaan suatu kaum atau suku dalam masyarakat.

Misalnya masyarakat Minang di Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan menjadikan tradisi *Batagak Gala* menjadi sebuah tradisi yang ditunggu-tunggu karena serangkaian kegiatan ini amat lah jarang dilaksanakan. Konsep gelar adat dalam masyarakat Minangkabau pada hakikatnya

telah telah diwarisi secara turun-temurun. Dalam pepatah minangkabau juga menjelaskan tentang “*Ketek banamo, gadang bagala*” (*usia kecil memiliki nama dan usia dewasa diberikan gelar*). Artinya masyarakat Minangkabau telah memberikan pengakuan secara adat terhadap kemampuan yang dimiliki seseorang mengacu kepada gelar yang dimilikinya. Meskipun dewasa ini telah banyak terjadi perubahan di tatanan budaya. Akan tetapi sistem pewarisan dan pelestarian gelaran adat masih terpelihara dan masih dipertahankan seperti mana yang terdapat dalam acara *Batagak Gala* di kalangan masyarakat Minang di Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Pada dasarnya acara *Batagak Gala* masyarakat di Kanagarian Kambang Barat merupakan bagian dari serangkaian kegiatan ritual keagamaan dengan kombinasi tradisi yang telah diwarisi secara turun-temurun.

Pemahaman religius merupakan basis dalam acara *Batagak Gala* dalam masyarakat Minang di Pesisir Selatan. Sesuai dengan falsafah Minang berbunyi “*Ka ateh ndak digiriak kumbang, ka bawah indak langkang bumi*” (*Ke arah atas tidak akan dirusak serangga kumbang, Ke bawah tidak akan sanggup dirusak bumi*). Makna filosofi ini menjelaskan bahwa individu yang terpilih sebagai pemegang gelar telah bersumpah atas nama kitab suci Al-Quran tentang kesetiaan dan pengabdian adalah semata karena Allah dan bertingkah laku dengan baik dalam kaumnya.

Pemahaman religius juga memberikan penekanan bahwa seorang pemegang gelar akan bertingkah laku tidak bertentangan dengan nilai moral yang menyimpang dalam adat. Adapun bentuk nilai religius yang terefleksi dalam nilai adat tentang falsafah berbunyi “*lamak diawak dan katuju di urang*” (*Enak bagi kita dan disetujui oleh orang lain*). Interpretasi makna semiotik dalam falsafah etnis Minang ini menjelaskan bahwa setiap individu perlu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai agama sehingga setiap sikap dan perbuatan akan disetujui oleh orang lain. Menurut Wallace (1996) menjelaskan nilai religius memiliki keterkaitan dengan kepemimpinan sehingga penerapan nilai religius oleh seorang pemimpin akan melahirkan corak kharismatik dan sakral dari bentuk sikap dan perbuatannya. Navis (1984) seorang pemimpin adat yang dapat dianggap pemimpin adat yang amanah apabila sikap dan perbuatannya tidak bertentangan dengan nilai religius dan nilai adat karena kedua standarisasi tersebut mengacu kepada konsep ABS-SBK dalam masyarakat Minang.

Nilai religius merupakan substansi yang mendasar dalam acara *Batagak Gala*. Hal ini terlihat dalam sikap dan perilaku kepemimpinan individu yang terpilih sebagai pemegang gelar. Menurut Navis (1984), pemegang gelar merupakan individu yang dianggap “sakral” kata-katanya dan perilakunya oleh kaumnya karena pemegang gelar terpilih sebagai orang yang terbaik dari generasi dalam sebuah kaumnya. Mereka yang terpilih dianggap memiliki pemahaman terhadap agama yang tinggi serta memiliki akhlak yang mulia berbasiskan nilai agama. Wallace (1966), berpendapat kepemimpinan adat oleh kaumnya dianggap memiliki keistimewaan dan kekuatan supernatural sehingga setiap sikap dan perbuatannya dianggap yang terbaik. Persepsi oleh kaumnya yang sedemikian disebabkan karena adanya keyakinan masyarakat terhadap nilai religius terhadap pemimpin adat dalam sebuah masyarakat.

Dengan dasar konsep Adat Basandi Syara, Syara Basandikan Kitabullah (ABS-SBK) telah membaur dalam pergelaran besar tersebut. Disambut dengan hiruk-pikuk dan semangat etnosentrisme di kalangan kaum tersebut memperlihatkan berapa tingginya semangat kebersamaan dan sistem kekerabatan persanakan dalam komunitas masyarakat Minangkabau seperti mana yang terpapar dalam acara *Batagak Gala*.

Secara kronologis, proses pengukuhan gelaran adat dalam acara *Batagak Gala* diwarnai dengan perarakan dengan berbagai ragam menu makanan yang dibawa secara beriring-iringan oleh kaum ibu-ibu (*bundo kanduang*). Menurut Attubani (2017), perarakan dalam acara *Batagak Gala* memperlihatkan tentang tingginya kepedulian dan semangat perkauman dan sukuisme

dalam masyarakat Minang. Manakala kaum laki-laki (*mamak*) yang dengan seragam adat menghadiri acara tersebut. Jalan raya yang dipenuhi oleh tumpah-ruah masyarakat berdatangan yang seolah-olah tidak dapat terbendung keramaian sehingga acara ini dengan serta merta dilengkapi dengan sistem pengamanan rapi oleh aparat kepolisian. Sudah jelas bahwa eksistensi tradisi dan keunikan budaya warisan leluhur Minangkabau di Kecamatan Lengayang tergolong kuat semangat kebersamaan perkauman dan sukuisme. Menurut Koentjaraningrat (1981) masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan budaya dan masing-masing budaya memiliki keragaman dan keunikan tradisi mereka masing-masing. Masing-masing pemilik budaya hidup bersama dan memiliki sistem kekerabatan yang kukuh yang diwarisi secara turun-temurun. Selain dari itu, pandangan Daniel (2006), keberagaman budaya (multikulturalisme) tersebut merupakan perihal yang perlu dipelihara dan dibangkitkan agar tidak pupus dibawa arus perkembangan zaman.

Keberagaman budaya pada prinsipnya merupakan sebuah ide-ide para leluhur yang diwarisi secara turun-temurun dan perlu dipertahankan. Menurut Boas (1940), setiap etnis memiliki sikap etnosentrisme terhadap budaya dan tradisinya masing-masing. Hal demikian menyebabkan masing-masing etnis memiliki sikap mengagung-agungkan budayanya sendiri dan memandang rendah terhadap budaya dan tradisi orang lain. Sikap yang sedemikian merupakan bentuk dari implikasi keragaman budaya yang pada akhirnya dapat memicu munculnya konflik antar etnis. Beliau juga menegaskan sikap terbuka dan menerima konsep keragaman budaya merupakan bentuk pendekatan dalam mengurangi terjadinya *gap* antar etnis dalam masyarakat.

Adapun bentuk keragaman komparatif masing-masing etnis juga dapat memicu munculnya sikap eksklusif dan cenderung bersikap tertutup menerima keragaman budaya lain. Boas (1940), corak penggunaan bahasa oleh masing-masing etnis pada prinsipnya adalah berbeda dan dialek serta loghat juga berbeda. Tidak jarang pula sebagian etnis menilai bahwa cara bertutur juga memperlihatkan status sosial seseorang dalam masyarakat sehingga mereka akan cenderung bersikap tertutup menerima individu yang tidak memiliki kemampuan bertutur bahasa. Misalnya, individu yang meyakini dirinya pandai dalam bertutur bahasa adat maka individu tersebut akan menilai bahwa dirinya merupakan orang yang ahli (*expert*) dalam ranah adat. Pemahaman tersebut merupakan bentuk dari implikasi dari keragaman komparatif dalam masyarakat yang multikulturalisme.

Masyarakat Minang di Kecamatan Lengayang tergolong masyarakat yang multikulturalisme dimana dalam etnis tersebut berbagai suku dan dalam suku juga terbagi menjadi garis keturunan (*kagadangan*). Selanjutnya, dalam garis *kagadangan* juga terdapat berbagai suku-suku kecil. Orang Minang di Kecamatan Lengayang terdiri dari 50 Andiko Ketek, 13 Andiko Gadang yang dipimpin yang dikepalai oleh seorang penghulu dalam sebuah organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Lengayang. Masyarakat Kecamatan Lengayang memiliki sistem organisasi adat, dinamakan Organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pada dasarnya organisasi KAN merupakan kelompok sosial yang berada di garda terdepan dalam menghidupkan kembali acara *Batagak Gala* dapat melestarikan tradisi kebudayaan dalam masyarakat Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. KAN merupakan organisasi sosial yang memiliki wewenang menetapkan dan memutuskan kelayakan bakal calon (*balon*) yang terpilih menjadi pewaris gelar adat dalam masyarakat Kecamatan Lengayang. Selain dari itu, organisasi KAN juga memiliki kekuasaan menetapkan dan memutuskan biaya perlu dipersiapkan untuk acara prosesi pengukuhan acara *Batagak Gala*.

Secara prosedur, setiap suku atau kaum di Kecamatan Lengayang yang akan melaksanakan acara *Batagak Gala* akan mengajukan *balon* nama yang telah dipilih oleh kaumnya untuk menyandang gelar kebesaran suku. Menurut Navis (1984), proses pengajuan *balon* nama

pewaris gelar adat perlu memiliki beberapa dokumen penting seperti dokumen surat kuasa dari pemegang gelar terdahulu, berita acara dan daftar hadir kaum yang telah disetujui oleh kepala suku (pucuk adat) dalam suatu kaum. Dengan telah lengkapnya dokumen tersebut maka kepala KAN akan memutuskan status kelayakan Balon nama yang diajukan oleh kaum atau suku mengikut kebesaran suku (Paruik). Setelah mendapatkan persetujuan dari KAN maka selanjutnya KAN akan menetapkan biaya yang diperlukan di mana terdapat dua tahapan dana yang perlu dipersiapkan, yakni pertama tentang biaya tahap pendaftaran dan kedua biaya tahap pengukuhan (*Malewa Gala*). Kedua tahapan tersebut secara finansial tergolong relatif besar sehingga individu yang akan terpilih menjadi Balon pewaris gelar tersebut cenderung berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke atas. Akibatnya, ramai di kalangan kaum atau suku di Kecamatan Lengayang akan memilih individu yang berasal dari individu yang berada dalam kategori sukses dari segi finansial. Ada kecenderungan bahwa hanya individu yang mapan saja yang akan terpilih menjadi calon penyandang gelar adat.

Memberikan kesempatan atau peluang kepada generasi yang akan memegang gelar namun tidak diiringi dengan kemampuan dalam kapasitasnya sebagai individu yang memahami adat itu sendiri merupakan sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Kebijakan kaum yang bersifat “memaksakan” kepada individu untuk menyandang gelaran adat yang sememangnya yang bersangkutan tidak sesuai maka akan muncul kebijakan yang merugikan diri sendiri dan kaumnya. Menurut Navis (1984), orang yang terpilih menyandang gelar adat setidaknya memiliki pemahaman tentang adatnya sendiri. Karena dihadang oleh besarnya jumlah nominal untuk biaya pengangkatan gelar ini adat ini menyebabkan terjadilah model pengambilan keputusan yang bersifat memaksa kaum untuk memilihnya.

Mengacu kepada konsep otonomi daerah yang memberikan penekanan tentang peranan masing-masing daerah untuk membangkitkan kembali (*revitalization*) terhadap budaya leluhurnya. Hal ini bertujuan agar setiap etnis atau kaum akan memiliki generasi penerus yang akan menyandang gelaran adat tersebut. Bilamana individu yang terpilih sebagai penyandang gelar adat dianggap sebagai pilihan yang dipaksakan maka acara penobatan gelaran adat tidak sejalan sepenuhnya sesuai dengan tujuan otonomi daerah seperti mana yang digaung-gaungkan oleh rezim kekuasaan Orde Reformasi. Akibatnya, kebangkitan budaya dalam kegiatan acara *Batagak Gala* belum memberikan hasil yang memuaskan.

## 2. Metode

Kajian ini menekankan terhadap kajian kualitatif karena sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara secara mendalam terhadap informan masyarakat Kanagarian Kambang Barat, Pesisir Selatan. Adapun metodologi kajian dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, metodologi pengumpulan data menggunakan kaedah wawancara (*in-depth interview*) terhadap informan kajian. Menurut Spradley (1998), teknik pengumpulan data atau maklumat menggunakan metode wawancara terhadap informan maka teknik pemilihan informan perlu diterapkan metode *snowball*. Kedua, metodologi pemilihan informan menggunakan kaedah *Snowball* dimana informan pertama merupakan sebagai informan kunci. Kemudian informan kunci atau informan utama akan memberikan rekomendasi kepada peneliti tentang nama informan kedua. Selanjutnya, informan kedua akan menunjukkan nama informan ketiga dan selanjutnya secara berkelanjutan sehingga ke informan terakhir. Informan terdiri dari enam orang di mana 1 orang informan berasal dari anggota KAN, 2 orang dari calon pemangku adat, 1 orang informan berasal dari orang yang baru saja melaksanakan acara *Batagak Gala*. 1 orang informan berasal dari pemuka agama dan 1 orang informan berasal dari pemuka masyarakat. Ketiga, metodologi analisis data menggunakan kaidah kualitatif

Selain dari itu, kajian ini juga menggunakan metode partisipasi observasi dimana peneliti juga menyaksikan secara langsung terhadap situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Menurut Atkinson dan Hammersley (2019) menjelaskan tentang prinsip-prinsip etnografi dalam kajian kualitatif. Pertama, peneliti dapat melakukan observasi secara langsung dan dapat menyaksikan secara langsung terhadap objek yang diamati. Prinsip ini menerangkan bahwa peneliti dapat mengajukan interview secara terperinci terhadap objek yang dikaji. Prinsip kedua berkaitan dengan keterbukaan. Peneliti perlu bersikap terbuka menjelaskan tentang maksud dan tujuan peneliti kepada objek yang dikaji prinsip ketiga, peneliti perlu bersikap objektif terhadap objek yang dikaji sehingga objek yang dikaji terbebas dari sikap subjektivitas pengkaji. Kaedah etnografi biasanya memberikan peluang kepada peneliti untuk lebih lama berada dalam lokasi yang sama sehingga peneliti mendapatkan maklumat lebih terperinci. Dengan adanya waktu kebersamaan dalam durasi yang relatif lama memungkinkan peneliti dapat mengajukan pertanyaan lebih detail.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Temuan kajian dibagi menjadi tiga bagian, yakni finansial pelaksanaan acara *Batagak Gala* polemik acara *Batagak Gala* dan strategi pemilihan bakal calon pewaris gelar dalam acara *Batagak Gala*. Finansial pelaksanaan acara *Batagak Gala* akan membahas tentang dampak biaya acara *Batagak Gala* terhadap proses pemilihan bakal calon pewaris gelar. Polemik acara *Batagak Gala* akan mengupas tentang konflik yang berasal dari tugas pokok dan fungsi pemegang gelar dalam kaumnya. Ketiga, strategi pemilihan bakal calon pewaris gelar adat dalam acara *Batagak Gala* akan mengupas tentang bagaimana kiat dan langkah untuk mencari dan mendapatkan bakal calon nama gelar adat yang terbaik dalam kaumnya sehingga dapat menghasilkan generasi muda yang terpilih sebagai pewaris gelar yang terbaik dalam kaumnya.

#### **3.1. Finansial Pelaksanaan Acara *Batagak Gala***

Proses demokrasi dalam masyarakat Minangkabau bukanlah sesuatu yang asing adanya. Dengan seni berbicara yang sarat dengan corak pantun, kiasan dan bahasa majas merupakan ciri khas dalam pertuturan di kalangan pemuka adat dalam masyarakat Pesisir Selatan, termasuk komunitas masyarakat Minang di Kecamatan Lengayang, tepatnya di Kanagarian Kambang Barat. Menurut Attubani (2017), keahlian dalam berkomunikasi adat merupakan sebuah nilai tambah seseorang dalam acara perkumpulan kaum laki-laki (*niniak mamak*) dalam berbagai kegiatan. Pada dasarnya terdapat berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan para *niniak mamak* yang merupakan petinggi adat dalam sebuah kaum seperti acara *Batagak Gala*. *Niniak mamak* merupakan individu kaum laki-laki dalam suatu kaum (*paruik*) memegang peranan penting dalam proses diskusi (*bapakat*) dalam sebuah ajang musyawarah. Misalnya acara *Batagak Gala* di Kanagarian Kambang Barat. Adapun bentuk dari proses pertama yang akan dilalui oleh sebuah kaum untuk melakukan acara *Batagak Gala* ini adalah menentukan status dari individu yang memegang gelar adat tersebut. Terdapat satu alasan yang umum sebagai faktor pendorong terbentuknya acara *Batagak Gala* berdasarkan hasil wawancara terhadap informan. Informan menyatakan bahwa acara *Batagak Gala* dilakukan disebabkan karena alasan faktor usia dimana individu yang berperan sebagai pemegang gelaran adat tidak dapat lagi aktif menghadiri serangkaian kegiatan demi kegiatan. Dengan usia senja diperlukan untuk mencari pengganti pemangku gelar adat sebelumnya sehingga akhirnya perlu dipersiapkan calon pengganti pewaris gelar adat yang akan dikukuhkan dalam acara *Batagak Gala*.

Ada kecenderungan kaum akan mengundang seluruh kaumnya seperti *niniak mamak*, *bundo kanduang* dan *sumando* untuk berdiskusi mencarikan individu pemangku gelaran adat

berkenaan. Acara mufakat yang digelar akan mengajukan beberapa calon yang akan menjadi calon pengganti pemangku adat yang lama. Pada dasarnya proses pemilihan pengganti pemangku gelar adat yang sudah usia senja dilakukan berdasarkan proses demokrasi. Namun persoalannya terletak pada biaya untuk acara pengukuhan gelar adat yang tergolong tinggi. Menurut informan menjelaskan biaya yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar sebagai calon pemangku gelaran adat berjumlah Rp 7.900.000 (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) dengan uraian di bawah ini.

**Tabel 1. Biaya Pendaftaran *Batagak Gala***

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Total (Rp)
1	Penghulu Kampai 4 Paruik	300.000	4	1.200.000
2	Ikek Kampai 4 Paruik	350.000	4	1.400.000
3	Rajo adat	500.000	1	500.000
4	Pucuak Sarak	350.000	1	350.000
5	Andiko Ketek	150.000	6	900.000
6	Biaya memasukan surat	800.000	1	800.000
7	Sidang Pengokohan	1.000.000	1	1.000.000
8	Transportasi Rajo	500.000	1	500.000
9	Uang siriah pinang	1.250.000	1	1.250.000
Jumlah keseluruhannya				7.900.000

Proses pendaftaran di atas merupakan salah satu bentuk contoh proses pengajuan daftar nama untuk suku Kampai di Kanagarian Kambang Barat. Untuk melangsungkan acara *Batagak Gala*. Secara finansial biaya acara *Batagak Gala* tersebut tergolong tinggi karena pengajuan dana sebanyak diatas merupakan biaya tahap permulaan. Hasil *interview* terhadap informan menyatakan biaya dengan nominal sebanyak Rp. 7.900.000 hanya akan disanggupi oleh individu yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke atas. Menurut Amirin (2013), tujuan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masing-masing etnis untuk menghidupkan dan mempertahankan tradisi dan potensi budaya serta kearifan lokal dalam masyarakat. Dengan adanya standarisasi jumlah nominal untuk acara *Batagak Gala* yang sukar terjangkau seluruh lapisan masyarakat mengakibatkan calon yang akan terpilih sebagai generasi penerus kaum cenderung berasal dari kalangan keluarga yang mapan dari segi ekonomi.

Pada dasarnya proses pemilihan nama calon pewaris gelaran adat telah dilalui secara proporsi mufakat dan bebas dalam pengajuan nama calon pewaris gelaran adat. Namun demikian, dengan jumlah ketetapan nominal uang tahap permulaan yang relatif tinggi dan sukar dijangkau oleh semua lapisan masyarakat menyebabkan proses pencalonan tidak berjalan sesuai dengan proses demokrasi yang adil. Pendapat Attubani (2017), proses demokrasi yang menjadi indikator finansial sebagai prioritas utama menyebabkan proses demokrasi seolah-olah telah terkendala oleh faktor keuangan. Bagi individu yang tidak memiliki kemampuan finansial tentu tidak memiliki peluang untuk dicalonkan sebagai calon pewaris gelaran adat. Justru sebaliknya, individu yang sukses di tanah rantau akan pulang ke kampung halaman untuk “mengambil” gelar adat tersebut dan kemudian individu berkenaan kembali ke tanah rantau. Secara tidak langsung model pemilihan penyandang gelar adat tidak berorientasi kepada kontribusi terhadap tradisi namun lebih berorientasi kepada stratifikasi sosial kelas atas.

Berdasarkan keterangan informan menjelaskan biaya tahap kedua merupakan biaya yang pada dasarnya lebih bergantung kepada kesiapan finansial individu yang akan pemegang gelaran adat berkenaan. Berdasarkan *interview* terhadap informan menjelaskan kos yang perlu

dikeluarkan untuk kegiatan tahap kedua yakni biaya saat acara *Batagak Gala* berlangsung biasanya akan menelan biaya sekurang-kurangnya Rp 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*). Meskipun individu yang akan melangsungkan *Batagak Gala* memilih opsi biaya kegiatan yang paling rendah namun jumlah nominal biaya tersebut masih tergolong tinggi dan tentunya hal demikian hanya dapat dilaksanakan oleh latar belakang keluarga yang mampu. Bahkan informan juga menjelaskan bahwa acara tahap kedua bisa mencapai Rp 100.000.000 hingga Rp 200.000.000.

Pemilihan nama calon pemangku gelaran adat telah dilaksanakan secara terbuka dengan menghadirkan seluruh anggota masyarakat dalam sebuah kaum. Akan tetapi, Nama calon yang akan diberikan mandat sebagai individu pemangku gelaran adat yang telah terpilih lebih mengutamakan kemampuan ekonomi. Bahkan tidak jarang pula terjadi yang terpilih sebagai pewaris gelaran adat tidak memiliki minat yang mendalam terhadap tradisi warisan leluhurnya. Ironisnya, hasil keputusan mufakat terkesan mengandung unsur diskriminatif karena proses pemilihan yang terjadi tidak didasari oleh kompetensi yang secara tidak langsung proses pemilihan yang dilakukan telah merugikan kaumnya sendiri karena generasi muda yang berdomisili di kampung halaman tidak layak menjadi penyandang gelar adat karena tidak mapan ekonomi. Meskipun generasi muda tersebut memiliki pengetahuan tentang tradisi namun kaum tidak akan memilihnya karena keterbatasan faktor finansial.

Sebagai dampaknya adalah kaum secara sebulat suara akan memilih generasi muda yang berdomisili di tanah rantau untuk penyandang gelar adat. Persoalannya adalah generasi muda yang terpilih yang berdomisili di tanah rantau pada umumnya tidak memiliki pemahaman adat dan mengenali sistem perkauman. Kecenderungan terpilihnya generasi muda sebagai Balon pewaris gelar tersebut disebabkan semata disebabkan karena kemampuan finansial. Menurut Attubani (2017), sebaik-baiknya pemimpin yang terpilih adalah orang yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan jabatannya. Dalam pepatah juga menjelaskan bahwa “berikanlah pedang atau senjata kepada ahlinya”. Menurut Errington (1984), pendekatan semiotik dalam esensi petuah tersebut menegaskan bahwa sebuah kapasitas jabatan harus dan perlu diberikan kepada individu yang menguasai sesuai dengan bidangnya. dalam upaya penguatan terhadap nilai budaya dan tradisi dalam masyarakat diperlukan proses sosialisasi sejak dini terhadap generasi ke generasi. Errington juga menegaskan proses sosialisasi dalam sebuah budaya dapat dilakukan oleh generasi yang lebih tua (generasi *baby boomer*) ke generasi muda (generasi *milenial atau gen Z*). proses sosialisasi antar generasi ini dapat memberikan kesadaran/psikologi sosial untuk menyadarkan bahwa pentingnya pendekatan pewarisan budaya secara berkelanjutan. Kurangnya pemahaman tradisi oleh pemiliknya merupakan bentuk implikasi dari rendahnya kesadaran sebuah generasi terhadap tradisinya sendiri. Koentjaraningrat (1981) memaparkan tentang keragaman budaya dalam masyarakat perlu diwarisi secara turun-temurun. Upaya pewarisan tradisi dapat dilakukan secara proses lisan (bercerita) baik dalam bentuk cerita dongeng (hikayat) ataupun cerita nasehat yang bertujuan untuk melahirkan kesadaran di kalangan generasi ke generasi. Pendekatan sederhana ini merupakan bentuk langkah untuk menciptakan psikologis sosial dalam sebuah masyarakat tentang kesadaran memelihara dan mempertahankan tradisi warisan nenek moyang.

Tidak tertutup kemungkinan ramai di kalangan generasi muda yang telah terasing dari nilai-nilai moral dan budaya warisan leluhur. Bahkan terdapat juga di antara mereka yang terpilih sebagai pewaris budaya tertinggi namun dirinya sendiri tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang budayanya sendiri. Ironisnya, justru individu yang terpilih sebagai pemangku gelar tersebut tidak menguasai tentang pemahaman tradisi karena dibesarkan dan berdomisili di tanah rantau. Keberadaan pewaris gelar yang jarang pulang menjenguk kaum dan kemenakan



yang secara hakikatnya karakter pemimpin tersebut tidak lagi menjalankan tanggung jawab serta memberikan kontribusi sesuai dengan sumpah yang diucapkan sewaktu acara pengukuhan gelar adat.

Pada dasarnya media teknologi komunikasi telah memudahkan setiap individu untuk berkomunikasi. Justru sebaliknya, kehadiran media teknologi komunikasi *gadget* misalnya tidak dimanfaatkan secara efektif sehingga tidak memberikan sisi positif dalam membangun komunikasi antara pemimpin kaum di tanah rantau dengan kaumnya di kampung halaman secara maksimal. Akibatnya, ramai di kalangan pemegang gelar adat menjadi tidak lagi mengenali garis keturunan kaumnya sendiri karena terlalu lama tidak berkomunikasi dengan sanak saudara dan kemenakan di kampung halaman. Berbagai persoalan yang terjadi kampung halaman juga tidak terbantuan. Bahkan setiap persoalan justeru hanya diselesaikan oleh *Panungkek* yang secara strukturalnya tidak sesuai dengan jabatan dan tugas pokok dan fungsi yang akan dijalankannya. Apalagi generasi muda seperti kemenakan yang memerlukan panduan (*role model*) di tengah arus globalisasi, modernisasi dan arus teknologi komunikasi yang kian mengancam. Giddens (1991), proses modernisasi telah membawa nilai-nilai budaya Barat yang pada akhirnya menyebabkan nilai-nilai budaya tempatan menjadi terkikis secara perlahan. Modernitas yang diagung-agungkan oleh masyarakat menyebabkan mereka telah terbawa arus modernisasi. Ditambah lagi dengan arus globalisasi yang menjadikan masyarakat bergerak seolah-olah tanpa adanya sempadan. Giddens menegaskan globalisasi telah menyebabkan masyarakat kehilangan panduan dan hala tuju yang jelas sehingga mereka yang sepatutnya berpegang teguh kepada nilai budaya dan tradisi tidak lagi menjadi skala prioritas. Sikap yang berlebihan untuk mengagung-agungkan nilai budaya asing telah membuat mereka menjadi terasing dan diasingkan dari tradisi para orang-orang terdahulu. Giddens dalam konsep modernitas memaparkan tentang dampak negatif dari arus modernisasi. Salah satu diantaranya masyarakat menjadi kehilangan jatidiri (*cultural identity*) karena sikap mengagungkan nilai budaya Barat yang berlebihan menyebabkan mereka menjadi terpisah jauh dari nilai tradisinya. Manakala globalisasi pula telah menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan jatidiri etnis (*ethnic identity*) sehingga mereka sukar dalam menentukan arah tujuan yang jelas karena ideologi mereka telah dicetak dan diwarnai oleh arus modernisasi dan globalisasi.

Teori modernisasi memperkenalkan istilah Juggernaut yang menjelaskan tentang kehadiran proses modernitas ini seumpama raksasa yang memiliki kekuatan yang kuat sehingga dapat mengancam siapa pun. Penjelasan teori ini memberikan penekanan tentang arus modernisasi menyebabkan manusia tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghindari sehingga terdapat kecenderungan manusia akan terbawa arus oleh proses-proses modernisasi tersebut. Menurut Giddens (1991) modernisasi membawa nilai-nilai Barat yang dianggap sebagai nilai-nilai baru yang pada akhirnya diterima pakai oleh masyarakat dan secara perlahan-lahan sehingga telah menggeser nilai-nilai lama yang dimiliki masyarakat. Masyarakat tradisional yang berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur cenderung berangsur-angsur mengaplikasikan nilai-nilai modern yang dianggap sebagai standar kekinian dalam masyarakat.

Dampak modernisasi dan globalisasi yang kian mengancam dan pada akhirnya kemenakan sebagai generasi penerus kaum telah kehilangan arah sehingga keberadaan kemenakan menjadi tidak terkawal baik secara perilaku atau etika dalam perkauman. Bahkan tidak jarang pula bentuk perilaku para generasi muda yang seolah-olah kurang mengimplementasikan nilai ABS-SBK seperti mana yang diwarisi secara turun-temurun. Sebagai dampaknya, kemenakan membesar dan berkembang sesuai nalurnya sendiri. Sementara mamak yang bergelar sebagai pewaris gelar telah dimonopoli oleh kesibukan yang relatif tinggi di tanah rantau yang secara tidak langsung individu pemegang gelar tidak lagi mengamalkan pepatah *didahulukan salangkah*

dan *ditinggikan sarantiang* untuk peranannya dalam sebuah kaum.

Besarnya biaya yang perlu dikeluarkan oleh calon pewaris gelar menyebabkan bakal calon penyandang gelar yang berasal dari latar belakang ekonomi kelas menengah kelas menengah dan bawah telah mengundurkan diri karena telah mengakui bahwa dirinya tidak akan mampu menyaingi pesaingnya yang berasal dari latar belakang ekonomi yang mapan.

### 3.2. Polemik Acara *Batagak Gala*

Pada dasarnya acara *Batagak Gala* merupakan kegiatan yang dinanti-nantikan oleh ramai orang. Hasil *interview* terhadap informan menjelaskan bahwa acara *Batagak Gala* merupakan salah satu penarik wisata sehingga ramai dari kalangan turis lokal maupun internasional ikut menyaksikan keunikan acara berkenaan. Selain dari itu, acara tersebut juga memiliki ciri khas tersendiri. Informan menjelaskan bahwa salah satunya adalah kemunculan seluruh tokoh pemangku adat di Kanagarian Kambang Barat di mana kehadiran para pemangku adat ini hanya muncul secara bersamaan khusus ketika adanya acara *Batagak Gala*. Dengan seragam pakaian kebesaran adat masing-masing mereka akan menyambut kedatangan calon pemegang gelar adat yang baru. Hal ini merupakan sebuah kegiatan yang sakral bagi kaumnya sendiri karena pesta penobatan gelar adat ini terjadi sekali dalam 20 atau 30 tahun lamanya.

Adalah menjadi sesuatu yang wajar ketika terjadi konflik dalam proses penggantian gelaran adat. Berdasarkan *interview* terhadap informan menjelaskan penyebab terjadinya konflik dalam perebutan gelaran adat disebabkan karena kurangnya kesiapan kaum mempersiapkan calon pengganti sebelum pemegang gelaran adat yang lama meninggal dunia terutama meninggal secara tiba-tiba. Akibatnya, kaum yang bersangkutan belum mempersiapkan calon nama pengganti gelaran adat. Kurangnya kesiapan dalam memprediksikan meninggalnya pemegang gelaran adat yang lama sering menjadi pemicu terjadinya pemilihan pengganti penyandang gelar adat yang mengutamakan individu dengan kemampuan ekonomi terutama dari kalangan individu yang berada di tanah rantau.

Pada dasarnya individu yang berdomisili di kampung halaman masih mampu untuk menjadi penyandang gelar adat meskipun harus berhadapan dengan pembiayaan yang tinggi. Namun disebabkan meninggalnya penyandang gelar adat secara dadakan dan perlu mencari pengganti penyandang gelar adat yang baru maka satu-satunya jalan yang ditempuh adalah individu yang mapan dari ekonomi agar acara *Batagak Gala* dapat segera dilangsungkan. Supaya tidak terjadinya kekosongan penyandang gelar adat terlalu lama maka kaum akan segera mencari pengganti dari kalangan individu yang mapan dari segi ekonomi baik yang berada di kampung halaman atau pun yang berada di tanah rantau.

Polemik yang sering dihadapi kaum ketika penyelesaian mencari pengganti penyandang gelar adat sering dipicu oleh perebutan. Menurut Berry (1965), konflik antar kaum dalam menentukan pilihan pengganti gelaran adat disebabkan karena kaum belum mempersiapkan calon pengganti serta belum adanya dokumen surat pemindahan kuasa terhadap pewaris gelar adat yang baru. Polemik ini akhirnya dapat memicu munculnya jarak sosial. Menurut Daryusti (2006), jarak sosial menyebabkan munculnya terjadi jurang pemisah dalam sebuah komunitas. Bahkan tidak jarang pula jarak sosial menghasilkan *gap* yang pada akhirnya menyebabkan munculnya gerakan pemisahan (*separatisme*) dalam sebuah kaum. Gerakan separatisme kaum memicu munculnya konflik baik konflik skala kecil (mikro) atau pun konflik skala besar (makro).

Konflik kecil ataupun konflik besar yang terjadi pada dasarnya telah memperlihatkan adanya gerakan pemisahan dalam etnis atau perkauman. *Interview* terhadap informan menjelaskan konflik yang terjadi dalam acara *Batagak Gala* ini dipicu oleh kurangnya kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan surat kuasa yang dipersiapkan oleh pemegang

gelar adat yang lama. Hal ini menyebabkan organisasi KAN selaku pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam acara pengukuhan *Batagak Gala* ini mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan karena tidak adanya kebulatan suara dalam suatu kaum. Interview informan menjelaskan telah terjadi konflik saat pengangkatan gelaran adat di mana gelaran adat tersebut memilih untuk membentuk gelaran baru karena tidak adanya kesamaan persepsi dan kesefahaman dalam memilih calon pemegang gelaran adat. Menurut Gillin dan Gillin (1954), teori konflik menjelaskan bahwa setiap persoalan yang terjadi memiliki sisi positif meskipun prosesnya diwarnai dengan keributan.

Konflik yang terjadi saat penentuan pewarisan gelaran adat telah memberikan sisi positif. Adapun bentuk sisi positif yakni dengan adanya kemunculan gelaran baru dalam suatu kaum. Kemunculan gelaran adat yang baru merupakan dampak negatif dari peristiwa “perebutan” dalam pengambilan gelaran adat. Namun pada prinsipnya justru telah menambah keberagaman (multikulturalisme) budaya dalam masyarakat Kanagarian Kambang Barat, Pesisir Selatan.

### **3.3. Strategi Pemilihan Bakal Calon Pewaris Gelar dalam Acara Batagak Gala**

Pelaksanaan acara *Batagak Gala* masyarakat Kanagarian Kambang Barat secara implementasinya masih berpegang kuat kepada nilai-nilai tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Adapun bentuk nilai-nilai yang bersifat tradisional dalam pelaksanaan acara *Batagak Gala* seperti acara penyembelihan hewan ternak lembu dalam acara pengukuhan gelar adat (*Malewakan Gala*). Penyembelihan hewan ternak berkenaan merupakan warisan dari leluhur yang masih dipertahankan dan diamalkan masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kambang Barat. Hal ini mencerminkan semangat masyarakat setempat mempertahankan tradisi warisan leluhur. Kemajuan media teknologi komunikasi, modernisasi dan globalisasi yang kian menantang terhadap eksistensi acara *Batagak Gala* dalam masyarakat. Giddens (1991) menjelaskan arus modernisasi telah menyebabkan masyarakat lebih memberikan skala prioritas terhadap produk Barat. Sikap antusias tersebut merupakan refleksi dari ideologi yang berorientasi kepada negara Barat. Tidak jarang pula muncul persepsi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya dari Barat dianggap menjadi sesuatu yang “istimewa”. pemahaman tersebut menerangkan makna adanya jurang pemisah antara sikap etnosentrisme terhadap budaya sendiri.

Pada dasarnya modernisasi dan globalisasi tidak lagi menjadi sesuatu yang baru dalam era 4.0 ini. Akan tetapi pemahaman yang terlalu mengagung-agungkan nilai budaya Barat merupakan bentuk sikap yang menyimpang karena ramai masyarakat dewasa ini giat membangun dan memberikan tumpuan perhatian terhadap potensi budaya yang tertuang dalam konsep kearifan lokal. Banyak hal yang sewajarnya dilakukan oleh kaum generasi muda dalam memajukan dan berkontribusi dalam tradisinya. Justru sebaliknya, generasi tersebut lebih memberikan tumpuan perhatian serius terhadap arus modernisasi dan globalisasi. Giddens (1991), arus modernisasi telah menciptakan *gap* antara tradisi dengan pemiliknya. Terbentuknya jurang pemisah ini merupakan dampak negatif dari modernisasi yang bergerak secara masif dan latin sehingga ramai di kalangan generasi muda tidak menyadari bahwa mereka sendiri telah berada dalam genggamannya arus modernisasi dan globalisasi itu sendiri.

Eksistensi tradisi dalam masyarakat pedesaan pada dasarnya telah berdiri kokoh dibandingkan tradisi di ruang lingkup masyarakat perkotaan. Menurut Sibarani (2017) masyarakat pedesaan penuh dengan nuansa moralitas dan seluk beluk tradisi yang masih jauh dari sentuhan arus modernitas dan walaupun pada akhirnya akan mengalami perubahan. Masyarakat pedesaan dengan kekuatan kepemimpinan adat yang memiliki karismatik tinggi dijadikan panutan dalam bertindak dan bertingkah laku oleh masyarakat. Keistimewaan tradisi

dalam masyarakat desa seperti hukum adat, pepatah adat, pantun adat dan serangkaian ritual adat yang sarat dengan nilai religius merupakan corak kekhasan masyarakat desa. Keistimewaan dari nilai budaya dan tradisi tersebut merupakan potensi daerah yang merupakan kearifan lokal yang perlu diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Seyogyanya kearifan lokal tersebut perlu dipelihara agar tidak terbawa arus oleh kemajuan zaman yang dipelopori oleh modernisasi, globalisasi dan teknologi komunikasi. Kearifan lokal yang menjadi penyangga utama dalam pemberdayaan tradisi perlu dipertahankan eksistensinya.

Manakala masyarakat pedesaan yang mayoritasnya berpegang teguh kepada nilai-nilai budaya lama sehingga tradisi dapat terpelihara dengan efektif. Manakala pengamalan tradisi di kalangan masyarakat perkotaan telah mengalami proses asimilasi terhadap nilai-nilai budaya baru yang dibawa oleh arus modernitas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa modernisasi dan globalisasi telah memberikan dampak yang kuat terhadap masyarakat kota dibandingkan masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, keberadaan tradisi secara bertahap tetap akan mengalami perubahan sosial disebabkan adanya sikap terbuka menerima nilai-nilai budaya baru yang dibawa oleh arus modernitas (Soekanto:1994). Secara perlahan-lahan tradisi acara *Batagak Gala* dalam masyarakat Minang juga akan terdampak oleh arus modernisasi dan globalisasi. Sukarnya dalam mencari calon pemegang gelar adat dalam acara *Batagak Gala* merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan oleh modernisasi dan globalisasi dalam masyarakat Minang di Kecamatan Lengayang.

Eksistensi acara *Batagak Gala* terutama dalam tradisi penyembelihan hewan ternak lembu masih dilestarikan. Pada dasarnya terdapat beberapa nilai moral yang tersirat dalam acara penyembelihan acara *Batagak Gala*. Menurut Widlok (2017), salah satu makna tersirat dari kegiatan penyembelihan hewan ternak yakni berkaitan dengan kesejahteraan. Individu yang mampu melaksanakan kegiatan penyembelihan memperlihatkan seseorang tersebut memiliki kelayakan dari segi ekonomi. Dalam acara *Batagak Gala* masih menerapkan kegiatan acara penyembelihan yang bertujuan untuk membuktikan kepada masyarakat khalayak bahwa individu yang menyandang gelaran adat tersebut memiliki kemampuan finansial.

Pada hakikatnya tradisi *Batagak Gala* dalam serangkaian penyembelihan hewan merupakan peristiwa sakral yang menjadi nilai moral dan jati diri kaum atau suku dalam masyarakat. Setiyadi (2016) berpendapat serangkaian demi serangkaian acara dalam tradisi merupakan kiat atau strategi membangun tradisi yang merupakan jatidiri kaum atau suku itu sendiri. Tindakan pembiaran atau mengasingkan diri atau menjauhi diri dari tradisi merupakan bentuk sikap pesimis dalam menyikapi arus perubahan yang berkembang. Meskipun arus modernisasi dan globalisasi seumpama raksasa yang dapat mengancam eksistensi sebuah tradisi namun pada hakikatnya corak kepemimpinan dan semangat kekitaan yang kuat oleh masing-masing kaum dapat mengurangi arus modernitas berkenaan. Pelaksanaan serangkaian tradisi yang sakral merupakan sikap dan semangat kekitaan yang dicurahkan oleh kaum untuk memperlihatkan jati diri mereka bahwa eksistensi tradisi mereka masih bertahan dan tidak terbawa arus budaya asing.

Selanjutnya, acara *Batagak Gala* akan menjalankan rutinitas tentang pembagian daging kepada warga yang datang. Makna yang tertuang dalam pemberian daging ini adalah untuk memperlihatkan adanya sikap dermawan dan suka berbagi. Menurut Navis (1984), tradisi membagikan daging membuktikan bahwa individu yang bergelar adat dapat dijadikan sebagai sandaran (*kayu gadang*) bagi kaumnya ketika mengalami kesusahan. Kaum yang ditimpa musibah atau pun memerlukan uluran tangan dari pemegang gelar merupakan intipati atau makna yang esensi dari pemberian daging secara gratis kepada warga yang hadir saat acara pengukuhan gelaran adat. Pembagian daging merupakan bentuk apresiasi dan bentuk tanggung

jawab moral dalam aspek ekonomi. Dalam Widlok (2017) masyarakat adat memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi dalam sebuah masyarakat. Masyarakat pedesaan yang terkenal dengan kuatnya berpegang teguh terhadap nilai budaya dan tradisi maka masyarakat tersebut memiliki kesadaran yang relatif kuat untuk saling membantu ekonomi sesama mereka. Manakala masyarakat perkotaan yang dikenali dengan sikap individualisme yang kental menyebabkan kesadaran membantu masyarakat yang lemah tergolong relatif rendah.

Widlok (2017) juga menjelaskan tentang konsep prinsip berbagi (*exchange*) dalam masyarakat adat. Semakin kuat masyarakatnya berpegang teguh kepada nilai adat dan tradisi maka semakin kuat semangat kekitaan dan kebersamaan. Hal ini tercermin dalam sikap gotong royong dalam masyarakat pedesaan (*homogeneity society*). Sedangkan masyarakat kota (*heterogeneity society*) yang terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang kompleks menyebabkan mereka hidup berorientasi kepada materialisme dan seolah-olah kurang memberikan tumpuan perhatian terhadap prinsip berbagi.

Dampak dari persepsi masyarakat yang menjelaskan tentang kesuksesan didasari oleh nilai mata uang menyebabkan penilaian terhadap kemampuan atau kelayakan dalam bidang adat menjadi terpinggirkan. Seolah-olah individu yang memiliki loyalitas terhadap adat menjadi sesuatu yang tidak prioritas. Secara esensi dapat diinterpretasikan bahwa standarisasi kemampuan ekonomi yang dijadikan sebagai standar untuk menyandang gelaran adat telah memberikan arti dangkal terhadap makna pergelaran adat yang sebenar. Persepsi negatif terhadap individu yang kurang mapan sering digaung-gaungkan oleh pendukung kelompok yang mengatasnamakan individu yang mapan dari segi ekonomi. Namun makna yang hakikat dalam acara peresmian gelar adat itu sendiri telah pupus seiring dengan budaya materialisme yang kian memberi corak terhadap pemikiran masyarakat. Menurut Berry (1965), budaya hedonisme dan materialisme telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehingga kriteria yang kerap kali menjadi indikator sukses adalah nilai materialisme.

Pada dasarnya kemampuan ekonomi untuk menjadi syarat penyandang gelaran adat memang perlu dijadikan sebagai standar dalam pemilihan calon nama penyandang gelaran adat. Namun demikian, hal tersebut perlu juga memiliki kemampuan komunikasi berbasiskan adat. Tidak jarang pula di antara penyandang gelaran adat tidak memiliki kemampuan dalam kapasitasnya sebagai pemuka adat. Untuk melahirkan calon penyandang gelaran adat tersebut perlu dipersiapkan sejak dini terhadap generasi muda. Menurut Berry (1965), generasi muda perlu diberikan pemaparan tentang nilai-nilai tradisi seperti bagaimana berbicara dan berkomunikasi di khalayak ramai dalam acara rapat adat (*bakumpua mamak*). Hal ini bertujuan agar para generasi muda mendapatkan ruang dan peluang tentang edukasi berkomunikasi berbasiskan adat sehingga mereka kelak menjadi pemimpin adat yang telah sukses di tanah rantau memiliki kemampuan dalam bidang adat. Ketika mereka terpilih menjadi pemangku adat dapat bertutur dan berkomunikasi menggunakan bahasa adat. Ramai di kalangan generasi muda yang telah terasing dengan tradisinya sendiri sejak usia dini. Dengan keseharian lebih bergantung kepada gadget dan tidak memberikan perhatian terhadap tradisi menyebabkan mereka telah terasing sejak usia dini. Ketika mereka terpilih sebagai pemangku adat di kemudian hari akan merasa asing terhadap tradisinya sendiri.

Pada dasarnya individu yang terpilih dalam kapasitasnya sebagai pemimpin memiliki komitmen terdapat ruang lingkup pekerjaan. Kepemimpinan (*leadership*) memainkan peranan terhadap keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI). TUPOKSI merupakan standarisasi utama dalam aktivitas monitoring dan evaluasi terhadap kepemimpinan yang dijalankan seseorang. Kegagalan individu dalam menjalankan TUPOKSI dapat terlihat apabila corak kepemimpinan yang dijalankan tidak memberikan sisi positif terhadaparganya.

Senada dengan itu, kepemimpinan pemuka adat yang memegang gelar adat diwajibkan untuk membantu dan menyelesaikan persoalan yang berkembang dalam kaumnya. Bilamana pemimpin adat yang terpilih sebagai pemangku gelar adat dalam kaumnya tidak memberikan kontribusi karena berada pada lokasi domisili yang jauh dari kaumnya akan memperlihatkan ciri-ciri kepemimpinan yang tidak menjalankan TUPOKSInya.

Selain dari itu, tingginya jumlah pembiayaan yang perlu dikeluarkan oleh calon pemuka adat menyebabkan proses pemilihan tidak didasari oleh kemampuan yang ideal. Menurut Soekanto (1994), kepemimpinan adat secara idealnya berasal dari kalangan individu yang memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang adat mereka sendiri. Ironisnya, yang terpilih justru berasal dari kalangan orang rantau yang memiliki kemampuan dari segi finansial. Senada dengan itu, Daryusti (2006), terpilihnya pemuka adat yang tidak didasari oleh kemampuan adat menyebabkan eksistensi adat dan kaumnya menjadi kurang diperhatikan. Kontribusi dan sumbangan pikiran dari pemuka adat yang diharapkan warga tidak terlaksana yang pada akhirnya menyebabkan eksistensi tradisi tidak berkembang dan stagnasi.

#### 4. Simpulan

Arus modernisasi dan globalisasi telah menyebabkan generasi muda terasing dari budaya leluhurnya sendiri. Sikap mengagung-agungkan budaya sendiri menyebabkan generasi muda telah terbawa arus oleh kemajuan yang berkembang. Hal ini tercermin dari kurang kesiapan masyarakat Minang di Kecamatan Lengayang untuk mempersiapkan calon pemegang gelar adat yang benar-benar memiliki pemahaman tentang tradisi warisan leluhurnya. Kehadiran pemegang gelar adat yang terpilih diharapkan mampu berperan sebagai *kayu gadang* dalam menerapkan prinsip berbagi (*exchange*). justru sebaliknya, kaum ditinggalkan oleh pemegang gelar menuju kota dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Besarnya biaya yang diperlukan untuk acara *Batagak Gala* menyebabkan individu yang kurang mampu tidak berpeluang untuk mendapatkan jabatan sebagai pengganti pemegang gelar adat. Akibatnya, kaum terpaksa memilih individu yang kaya dari tanah rantau sebagai calon penyandang gelar adat meskipun individu tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang tradisi sebagai warisan leluhur. Ironisnya, individu yang terpilih sebagai pemegang gelar adat berasal dari kalangan individu yang berada jauh di tanah rantau (kota). Selain dari itu, meninggalnya pemegang gelar adat secara dadakan menyebabkan terjadinya konflik internal kaum karena belum adanya calon pengganti yang dipersiapkan oleh kaum. Konflik tersebut menyebabkan masing-masing kubu membentuk gelar baru dalam suatu kaum. Bahkan tidak jarang pula kaum akan memilih individu yang kaya yang berada di tanah rantau untuk menyandang gelar kebesaran kaum dalam sebuah masyarakat di Kanagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

#### Referensi

- Abdul, G.K. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdullah, I. 2002. *Desentralisasi, Globalisasi Dan Demokrasi Lokal: Diversity Budaya, Hak-Hak Budaya Daerah Dan Politik Lokal Di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Atkinson, Paul & Hammersley, Martyn. 2019. *Ethnography: Principles In Practice*. Routledge.
- Attubani, Riwayat. 2017. *Pepatah Petitih dan Adat Minangkabau*. Padang: Createspace
- Berry, B. 1965. *Race and Ethnic Relations*. Boston: Houghton Mifflin.
- Boas, F. 1940. *Race, Language and Culture*. New York: Double-day
- Daniel, E.M. 2006. *Kebangkitan Peran Budaya*. LP3ES, Jakarta. Terj.
- Daryusti. 2006. *Hegemoni Penghulu dalam Perspektif Budaya*. Pustaka, Yogyakarta.

- Damsar. 2005. *The Perception of The Problem Of Local Autonomy: Response of West Sumatera To The Implementation of The Law no.22/ 1999*. Universitas Andalas Press, Padang.
- Errington, F.K. 1984. *Manners and Meaning in West Sumatra. The Social Context of Consciousness*. New Haven, London: Yale University Press.
- Foley, A.W. 1997. *Anthropological Linguistics and Introduction*. University of Sydney: Blackwell Publisher
- Gillin JL, Gillin JP. 1954. *A Revision of An Introduction To Sociology*. The Macmillan Company, New York.
- Giddens, A. 1991. *Modernity and Self-Identity: Self and Society In The Late Modern Age*. Cambridge Polity Press, New York.
- Istiqomah, A., & Widiyanto, D. 2020. *Ancaman Budaya Pop (Pop Culture) Terhadap Penguatan Identitas Nasional Masyarakat Urban*. Jurnal Kalacakra , 1(1), 18–24.
- Malik, Rahman. 2016. Ikatan Kekkerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI. *Jurnal Analisis Sosiologi*, 5(2).
- McQuail, Dennis. 2010. *Mass Communication Theory*. London: Sage Publication.
- Nasution, R. D. 2017. *Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia*. Jurnal Penelitian 39 Komunikasi Dan Opini Publik, 21(1), 30–42.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Temprint.
- Rozi, S. 2013. *Konstruksi Identitas Agama Dan Budaya Etnis Minangkabau Di Daerah Perbatasan: Perubahan Identitas Dalam Interaksi Antar Etnis Di Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat*. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 215–245.
- Santosa, R. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kebahasaan*. Surakarta. UNS Press
- Setiyadi, Tulus. 2016. *Menelusuri Jejak Tradisi Membangun Jati Diri*. Madiun: CV Raditeens
- Saroni, S. 2018. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah*. Aviasi : Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan, 15(1), 47–75. <https://doi.org/10.52186/aviasi.v15i1.5>
- Sibarani, Robert. 2013. *Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kearifan lokal Sebagai Identitas Bangsa*. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks552> “Ethnicity and Globalization”
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Spradley, James. P. 2016. *Participant Observation*. USA: Waveland Press, Inc.
- Wallace AFC. 1966. *Religion: An Anthropological View*. Random House, New York.
- Widlok, Thomas. 2017. *Anthropology and the Economy of Sharing*. Routledge: Taylor & Francis.